

Analisis Sejarah Kelembagaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al-Muttaqin, Kabupaten Deli Serdang

Hafidoh¹

¹STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, Indonesia,

¹*email: hafidohshaleha@gmail.com*

Abstract

The purpose of this study was to determine the institutional history of Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, by taking the research location at MDTA Al-Muttaqin which is located at Jl. Karya III, Hamlet II, Helvetia, Sunggal District, Deli Serdang Regency. MDTA Al-Muttaqin, which is under the auspices of the Al-Muttaqin Mosque's National Authority, obtained an operating permit from the Ministry of Religious Affairs, Kab. Deli Serdang. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Collecting data using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used a descriptive approach. The object of research is the history of the development of MDTA Al-Muttaqin. The results of the study discuss the history of Al-Muttaqin MDTA, along with a discussion of relevant previous research studies.

Keywords:
History;
Institutional;
Madrasah

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah kelembagaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, dengan mengambil lokasi penelitian di MDTA Al-Muttaqin yang beralamat di Jl. Karya III, Dusun II, Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. MDTA Al-Muttaqin yang berada di bawah naungan Badan Kenaziran Masjid Al-Muttaqin memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama Kab. Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Objek penelitian tentang sejarah perkembangan MDTA Al-Muttaqin. Hasil penelitian membahas tentang sejarah MDTA Al-Muttaqin, berikut pembahasan kajian penelitian terdahulu yang relevan.

Kata Kunci:
Sejarah;
Kelembagaan;
Madrasah

Received : 12 Februari 2021; Revised: 14 Maret 2021; Accepted: 18 April 2020

1. Pendahuluan

Suatu kenyataan sejarah bahwa ummat Islam tiada henti-hentinya untuk selalu mengupayakan perbaikan sistem pendidikan Islam. Munculnya madrasah adalah realisasi dari upaya tersebut sebagai pembaharuan di dalam bidang pendidikan. Maka pada sekitar awal abad ke-20 bermunculanlah lembaga pendidikan madrasah di hampir seluruh nusantara. Upaya pengembangan dilakukan, namun tantangan dan rintangan datang silih berganti sampai akhirnya bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya, dan pembinaan terhadap madrasah menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Sejak itulah upaya penyeragaman bentuk dan sistem pengajarannya, terutama kurikulum madrasah mulai dilakukan dengan baik. Pada puncaknya adalah munculnya SKB 3 Menteri, yang merupakan moment paling penting bagi realisasi upaya pengembangan madrasah.

Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. *Pertama*, Pendidikan Diniyah Takmiliyah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. *Kedua*, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. *Ketiga*, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari. *Keempat*, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni: Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah berlangsung 4 tahun (4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah siswa yang belakar pada sekolah Dasar dan SMP/SMU. Sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, Madrasah Diniyah bertujuan: 1) Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. 2) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperluakan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi, dan 3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Dalam penelitian ini penulis menyoroti tentang sejarah perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al-Muttaqin yang berada di Dusun II Helvetia kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dengan objek pengamatan tentang sejarah dan eksistensi MDTA Al-Muttaqin dikaitkan dengan kajian kepustakaan yang dipaparkan dalam kajian leteratur mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan ciri-ciri MDTA, serta administrasi MDTA. Selain itu dalam pembahasan juga memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga data yang diperoleh dalam hasil penelitian dapat dianalisis secara deskriptif.

Menurut Daulay (2007;78), Madrasah adalah merupakan perpaduan antara pendidikan pesantren dan sekolah. Ciri kepesantrenan yang diadopsi oleh madrasah adalah ilmu-ilmu agama serta sikap hidup beragama. Ciri sekolah yang diadopsi oleh madrasah adalah sistem klasikal, mata pelajaran umum,

manajemen pendidikan. Pada masa colonial madrasah tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa dikoordinir oleh pemerintah.

a. Tujuan dan Fungsi Madrasah Diniyah

Tujuan umum madrasah Diniyah adalah sebagai mana tertuang dalam pedoman penyelenggaraannya dan pembinaan Madrasah Diniyah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2000. Tujuan tersebut sebagai berikut: "Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Diniyah bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah umum".

Berdasarkan tujuan umum tersebut lebih lanjut dirumuskan dalam tujuan institusional yang dapat dispesifikan berdasarkan bidang pengetahuan, pengalaman, nilai dan sikap, sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang pengetahuan agar siswa memiliki pengetahuan tentang agama Islam dan bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran Islam.
- 2) Dalam bidang pengamalan agar siswa dapat mengamalkan ajaran agama islam, dapat belajar dengan cara yang baik dan dapat bekerja sama dengan orang lain serta dapat menggunakan bahasa Arab.
- 3) Dalam bidang nilai dan sikap agar siswa dapat memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap ajaran islam; baik bagi dirinya, agamanya, sosial dan budaya sekitarnya.

Dasar dari tujuan madrasah diniyatul awaliyah ini sama dengan tujuan madrasah diniyatul pada tingkat sesudahnya (Wustha dan Ulya) yaitu di samping sebagai tuntutan secara normatif juga sebagai tuntutan dari orang tua dan kebutuhan masyarakat yang memang mengarah pada tiga tujuan yang telah dikemukakan di atas. Maka dari itu secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aspek keterampilan bahasa Arab dimungkinkan anak dapat membaca dan menulis Al-Quran.
- 2) Aspek pengetahuan dan pengalaman agar anak dapat menguasai dan mengamalkan ajaran Islam.
- 3) Aspek sikap, dengan terbiasanya anak berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain mempunyai tujuan, Diniyatul Awaliyah pun mempunyai fungsi yang sangat vital. Adapun Fungsi Madrasah Awaliyah di antaranya:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadits, tajwid, aqidah akhlaq, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab dan praktik ibadah.
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar pada sekolah dasar.
- 3) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam.
- 4) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua, warga belajar dan masyarakat.
- 5) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan

b. Ciri-ciri Madrasah Diniyah

Dengan meninjau secara pertumbuhan dan banyaknya aktifitas yang diselenggarakan sub-sistem Madrasah Diniyah, maka dapat dikatakan ciri-ciri ekstrakurikuler Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

- 1) Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal.

- 2) Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
- 3) Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat.
- 4) Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.
- 5) Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama.
- 6) Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam-macam.

c. **Administrasi Madrasah Diniyah**

Administrasi Madrasah Diniyah ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun materil secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah Diniyah secara optimal.

Prinsip Umum Administrasi Madrasah Diniyah:

- 1) Bersifat praktis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di madrasah Diniyah.
- 2) Berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar.
- 3) Dilaksanakan dengan suatu system mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum.

Ruang Lingkup

- 1) Secara makro administrasi pendidikan di Madrasah Diniyah mencakup: Kurikulum, Warga belajar, Ketenagaan, Keuangan, Saran/prasarana/gedung dan perlengkapan lainnya, Hubungan kerjasama dengan masyarakat
- 2) Dilihat dari Proses kegiatan pengelolaan dan perlengkapan, maka administrasi pendidikan mencakup: kegiatan merencanakan (planning), kegiatan mengorganisasikan (Organizing), kegiatan mengarahkan (Directing), kegiatan mengkoordinasikan (Coordinating), kegiatan mengawasi (Controlling), dan kegiatan evaluasi

2. **Methods**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, berarti pendekatan dalam penelitian ini mengarah pada jenis penelitian kualitatif, karena masalah yang diteliti merupakan sejarah madrasah diniyah takmilyah awwaliyah (MDTA) Al-Muttaqin yang berlokasi di Jl. Karya III, Dusun II Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Teknik analisis data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengamati perkembangan MDTA Al-Muttaqin dan mencari tahu dari informan tentang sejarah dan latar belakang berdirinya MDTA Al-Muttaqin, serta perkembangannya hingga saat ini. Tokoh masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan MDTA Al-Muttaqin dan juga pengurus Kenaziran Masjid Al-Muttaqin, merupakan sumber data yang memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam tulisan ini. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, terdiri data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari madrasah yaitu dokumen, yang arsip tentang sejarah pendirian dan perkembangan MDTA Al-Muttaqin.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif, Langkah terakhir dalam analisis data dengan melakukan penafsiran data, yang diperoleh selain dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, juga diperoleh dengan mengamati penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Sebagaimana dikemukakan Moleong (2003) terdapat dua langkah dalam melakukan penafsiran data yaitu menemukan katagori dan kawasannya serta interogasi terhadap data. Katagori bermakna mengelompokkan data-data dari informasi yang sesuai dengan aspek-aspek penelitian yang diteliti.

3. Result and Discussion

a. Sejarah MDTA Al-Muttaqin

Latar belakang pendirian MDTA Al-Muttaqin adalah dengan semangat umat muslim/muslimat serta swadaya masyarakat Dusun II, Jl. Karya II Helvetia, kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, maka dapatlah berdiri satu wadah/tempat pendidikan Madrasah Diniyah Awwaliyah pada tanggal 1 Juli 1997, yang bertujuan untuk pendidikan umat Islam, khususnya para generasi muda sebagai penerus Agama, Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berakidah Alqur'an dan As Sunnah Rasulullah SAW.

Pendidikan Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA), yang kita telah berubah menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al-Muttaqin adalah merupakan salah satu wujud positif kinerja para warga khususnya yang terorganisir dalam wadah Kenaziran Masjid Al-Muttaqin, yang kala itu diketuai oleh Bapak Said. MDTA Al-Muttaqin merupakan sarana dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam dan Pembinaan Kehidupan Bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke-4 (empat), maka MDTA Al-Muttaqin turut berperan aktif didalamnya sesuai dengan pemberian nama Al-Muttaqin dalam arti kata "Attaqwa" atau takut atas larangan Allah SWT, yang juga memberikan Pendidikan dan Pembinaan Umat, dari kebodohan dan ketertinggalan, baik dalam ajaran agama Islam (Alqur'an dan As Sunnah) maupun pengetahuan umum, sehingga dapat tercapai dan terwujud cita-cita Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh amal zhohir dan bathin.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Al-Muttaqin berdiri dan beroperasi sejak tahun 1997 yang beralamatkan di Jalan Kapten Sumarsono Karya III Helvetia, Nomor 51, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. MDTA Al-Muttaqin memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama RI Kabupaten Deli Serdang.

b. Visi dan Misi MDTA Al-Muttaqin

VISI : Menjadikan MDTA Al-Muttaqin yang unggul dalam segala bidang, terutama di bidang Agama pada pendidikan dasar.

MISI : Meningkatkan kualitas guru, guna membentuk Pendidikan yang berdedikasi, profesional, produktif dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung, antara lain: menyediakan fasilitas, menjalin kerjasama, dan ikut dalam kegiatan organisasi profesi.

TUJUAN : Meningkatkan generasi bangsa menjadi kader yang beriman berakhlakul karimah dan lebih memajukan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari MDTA Al-Muttaqin mengenai sejarah dan perkembangannya yang hingga kini telah 20 tahun beroperasi dan tetap eksis dengan jumlah siswa yang kian bertambah, fasilitas yang semakin baik, dan mutu pendidikan khususnya pendidikan Islam yang kian meningkat, maka MDTA Al-Muttaqin merupakan salah satu madrasah non formal dari sekian banyaknya madrasah non formal lainnya yang tetap eksis keberadaannya di masyarakat Indonesia, untuk tetap berupaya mengembangkan pendidikan Islam bagi generasi muda penerus bangsa. Berikut beberapa analisis histori tentang perkembangan madrasah;

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Evi Fatimatur Rusydiyah (2017), tentang *Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa Kh.A.Wahid Hasyim*, dengan lingkup pembahasan tulisan ini pada kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, baik konsep ataupun praktis. Sebagai fondasi, maka penulis meninjau pemikiran dan kebijakan KH.A.Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama. Politik pendidikan Islam dalam pandangan Kiai Wahid ini akan disandingkan dengan kajian historis, mulai zaman kolonial, kemerdekaan dan revolusi, orde baru hingga reformasi. Dalam konteks sejarah, terdapat perubahan sistem pemerintahan di Indonesia - yang berimplikasi terhadap dinamika pendidikan Islam. Perubahan pemerintahan, pemimpin, sistem akan diiringi perubahan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian dalam kurun waktu yang sangat panjang, kita ketahui bahwa pada masa revolusi mulai diberikan arah yang jelas mengenai pendidikan Islam. Ini terbukti dengan pemerintah membentuk Departemen Agama sebagai wadah untuk mereformulasi kebijakan dan penentu arah juang misi ajaran Islam. Dalam perkembangan berbangsa dan bernegara, politik sebagai kebijakan telah melahirkan pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam. Core idea yang dapat penulis jabarkan adalah kebijakan tentang politik pendidikan Islam pada masa KH.A.Wahid Hasyim sebagai tokoh pendidikan sekaligus Menteri Agama yakni diterapkannya konsep modern dengan desain kurikulum baru di lembaga pendidikan Islam (seperti pesantren dan madrasah). Selanjutnya Kiai Wahid menghilangkan dikotomi dalam dunia pendidikan, sehingga terjadi sitesa dan integrasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Untuk mengembangkan konsep ini, maka dikeluarkan beberapa kebijakan, yang di antaranya adalah penggunaan bahasa Indonesia di madrasah dan berdirinya IAIN Jakarta sebagai wadah pengembangan kelimuan yang terintegrasi.

Muhammad Sabarudin (2015) juga melakukan penelitian tentang. *Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan*. Proses pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam di Indonesia pertama kali melewati bermacam-macam kontak, diantaranya: kontrak jual beli, kontak perkawinan serta kontak dakwah secara langsung, baik secara individu maupun kolektif. Dari berbagai macam kontak inilah proses pendidikan dan pengajaran Islam berlangsung meskipun dalam ruang lingkup yang sederhana. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama dalam masyarakat muslim di Indonesia. Disamping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam sistem yang sederhana. Sebagai contohnya; sistem pengajaran yang menggunakan konsep halaqah yang dilakukan ditempat-tempat peribadatan seperti masjid, mushalla bahkan di rumah-rumah para ulama. Kebutuhan

terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi serta mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Budha menjadi pesantren yang bernuansa Islami; umat Islam di Minangkabau mengambil alih Surau sebagai peninggalan adat masyarakat Minangkabau menjadi lembaga pendidikan Islam; dan demikian halnya masyarakat Aceh mengubah fungsi Meunasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Sistem pendidikan di era penjajahan Belanda, sangat kontradiktif dengan sistem pendidikan tradisional Islam dalam berbagai aspek keagamaan. Sistem pendidikan di era penjajahan Belanda tidak memberikan tekanan sama sekali pada pengetahuan keagamaan, karena mereka lebih menitikberatkan pada kepentingan duniawi semata. Tujuan pendidikan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda sebagai pegawai pemerintahannya. Namun, harus diakui bahwa sistem serta metode pendidikan dan pengajaran yang diimplementasikan dalam lembaga pendidikannya jauh lebih baik dan modern bila dibandingkan dengan sistem dan metode pada lembaga pendidikan tradisional Islam. Pendidikan Islam di zaman pemerintahan Jepang terkait erat dengan konsep Nippon Cahaya Asia. Hal ini disebabkan pemerintahan pada saat itu membutuhkan umat Islam terkait dengan perang Asia Timur Raya. Begitu pula umat Islam yang mengharapkan kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh pemerintahan Jepang. Hal ini tergambar bagaimana upaya Jepang dalam memberikan ruang dan materi kepada masyarakat muslim dalam menerapkan sistem pendidikan Islam di berbagai madrasah dengan penuh pengawasan.

Rengga Satria (2014), yaitu tentang *Politik Pendidikan Islam Studi Kebijakan Orde Baru Terhadap Madrasah*. Penelitian ini membahas dinamika pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan dialektika yang intens dengan negara. Kondisi ini nampak dari berbagai kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, masa dimana eksistensi madrasah ditentukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi madrasah menemukan jalan baru dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru karena sikap politik pemerintah yang akomodatif terhadap pendidikan Islam terutama pendidikan madrasah. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan madrasah dapat digambarkan secara garis besar kedalam beberapa hal, sebagai berikut: *Pertama*, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang berupaya menjembatani dualism pendidikan di Indonesia, melalui terbitnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan dipertegas dengan UUSPN nomor 2 Tahun 1989. *Kedua*, SKB 3 Menteri Tahun 1975 menjadi titik awal pengembangan kurikulum di lingkungan pendidikan madrasah. Berdasarkan SKB 3 menteri ini kurikulum madrasah menjadi 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. *Ketiga*, pendidikan madrasah pasca SKB 3 Menteri dikhawatirkan tidak akan mampu mencetak para ulama yang dibutuhkan oleh umat Islam. Sehingga Menteri Agama menginisiasi pendirian MAPK guna melahirkan para lulusan yang diharapkan mampu menjadi para ulama yang mampu merespon pembangunan bangsa dengan baik. *Keempat*, berdasarkan UUSPN No 2 tahun 1989 Madrasah mendapat status baru sebagai Sekolah umum berciri khas Islam.

Akrim (2008), membahas tentang *Pengembangan Pendidikan Madrasah di Indonesia*, Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, perpaduan antara pesantren dan sekolah umum. Pengembangan Madrasah dalam tulisan ini dibagi kedalam 2 tahap secara garis besar yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia madrasah didirikan oleh perseorangan dan organisasi keagamaan. Pasca kemerdekaan Indonesia terlebih sejak didirikannya Departemen Agama upaya pengembangan madrasah terus menerus dilakukan oleh pemerintah.

Diantara kebijakan yang telah dibuat adalah SKB 3 Menteri dan Kurikulum 1984, Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) atau Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), kurikulum 1984, dan Madrasah Unggulan (model).

Kemudian, Siti Halimah (2015) juga melakukan penelitian tentang, *Manajemen Dan Kebijakan Politik Pemerintahan di Indonesia Tentang Pendidikan Agama Islam*. Tulisan ini menjelaskan pendidikan Islam di Indonesia yang terbagi menjadi tiga macam. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga dengan diakuinya pendidikan Islam oleh pemerintah. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dengan diberlakukannya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai dengan ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. Begitu Islam masuk ke Indonesia, secara langsung atau tidak telah bersentuhan dengan kebijakan pemerintah atau penguasa Indonesia. Kebijakan tersebut sedikit atau banyak telah mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. UU tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

4. Conclusion

Dalam konteks sejarah, terdapat perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang berimplikasi terhadap dinamika pendidikan Islam. Perubahan pemerintahan, pemimpin, sistem akan diiringi perubahan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian dalam kurun waktu yang sangat panjang, kita ketahui bahwa pada masa revolusi mulai diberikan arah yang jelas mengenai pendidikan Islam. Ini terbukti dengan pemerintah membentuk Departemen Agama sebagai wadah untuk mereformulasi kebijakan dan penentu arah juang misi ajaran Islam.

Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama dalam masyarakat muslim di Indonesia. Disamping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam sistem yang sederhana. Eksistensi madrasah menemukan jalan baru dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru karena sikap politik pemerintah yang akomodatif terhadap pendidikan Islam terutama pendidikan madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, perpaduan antara pesantren dan sekolah umum. Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. UU tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari MDTA Al-Muttaqin mengenai sejarah dan perkembangannya yang hingga kini telah 20 tahun beroperasi dan tetap eksis dengan jumlah siswa yang kian bertambah, fasilitas yang semakin baik, dan mutu pendidikan khususnya pendidikan Islam yang kian meningkat, maka MDTA Al-Muttaqin merupakan salah satu madrasah non formal dari sekian banyaknya madrasah non formal lainnya yang tetap eksis keberadaannya di masyarakat Indonesia, untuk tetap berupaya mengembangkan pendidikan Islam bagi generasi muda penerus bangsa. Berikut beberapa analisis histori tentang perkembangan madrasah

5. References

- Akrim (2008). *Pengembangan Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jurnal Intiqod, Volume 1 Nomor 1 Juni 2008
- Azyumardi Azra (2000). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Evi Fatimatur Rusydiyah (2007). *Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri Masa Kh.A. Wahid Hasyim*. Jurnal Al-Ibroh, Volume 2, Nomor 1 Mei 2017.
- Haidar Putra Daulay (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Moleong, L. J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sabarudin (2015). *Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan*. Jurnal Tarbiya, Volume 1, Nomor1, tahun 2015.
- Rengga Satria (2014). *Politik Pendidikan Islam Studi Kebijakan Orde Baru Terhadap Madrasah*. Jurnal Penelitian Keislaman, Volume 10, Nomor 1, Januari 2014.
- Siti Halimah (2015), *Manajemen Dan Kebijakan Politik Pemerintahan Di Indonesia Tentang Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Didaktika Religia, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2015.
- Hamdihi, *Apa Sih Madrasah Diniyah Itu?????*, <http://kkmdsaketi.blogspot.com/2013/09/apa-sih-madrasah-diniyah-itu.html>